

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG

**Ramaezha Amino Rinmayoga
28.0609**

**Asal pendaftaran Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Program studi Politik Pemerintahan
Email: ramaezhaa@gmail.com**

ABSTRACT

This research is entitled Implementation of the Joint People's Movement Program to Overcome Dense, Slum, Poor Areas and Empowerment of Environmental Socio-Economics in Rajeg District, Tangerang Regency. This research aims to describe and analyze The Implementation of the Joint People's Movement Program to Overcome Dense, Slum, Poor Areas and Empowerment of the Socio-Economic Environment in Rajeg District, Tangerang Regency, to identify and analyze the obstacles. And supporting factors, as well as analyzing the positive impact.

The research design used is qualitative research with an inductive descriptive approach. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation. The theory used is the implementation concept according to Van Horn and Van Meter.

Based on the results of the research and analysis by the author, The Implementation of the Joint People's Movement Program to Overcome Solid, Slum, Poor and Empowerment of the Socio-Economic Environment in Rajeg Regency has been running optimally. The supporting factors are 1) Community Participation, 2) Support from political figures and officials in program implementation and 3) good coordination between the technical and implementing teams. Inhibiting factors, namely, 1) The cost of construction labour is expensive, 2) The amount of budget funds is not adjusted to the actual situation, 3) Limitation in determining the location of the beneficiaries, 4) The educational background of the implementers in the field.

Suggestions for the results of this study include reviewing the determination of beneficiary areas, increasing the program budget, selecting higher competencies for members of the implementing team, counselling and training to build the community's economy.

Keywords : Policy Implementation, Community Empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukungnya, serta menganalisis dampak positifnya.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan adalah konsep implementasi menurut Van Horn dan Van Meter.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg sudah berjalan optimal. Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu 1) partisipasi masyarakat, 2) Dukungan para tokoh politik serta pejabat dalam penyelenggaraan program serta 3) koordinasi yang baik antara tim teknis dengan pelaksana . faktor penghambatnya yaitu, 1) *Cost* tukang bangunan yang mahal, 2) Jumlah dana anggaran yang tidak disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya, 3) pembatasan penentuan lokasi penerima bantuan, 4) latar belakang pendidikan para pelaksana di lapangan.

Saran terhadap hasil penelitian yaitu peninjauan kembali terhadap penetapan kawasan penerima bantuan, peningkatan jumlah anggaran program, seleksi kompetensi yang lebih tinggi untuk anggota tim pelaksana, penyuluhan serta pelatihan untuk membangun ekonomi masyarakatnya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang berkaitan dengan permukiman semakin kompleks, kondisi permukiman yang kumuh jadi salah satu masalah yang sulit dihadapi di Indonesia, khususnya daerah penyangga perkotaan seperti Kabupaten Tangerang yang menyangga Provinsi DKI Jakarta. Banyak masyarakat dari desa yang mengadu nasib mereka untuk pergi ke kota dengan modal kemampuan yang minim.

Beralaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengungkap bahwasanya negara memiliki tujuan untuk merealisasikan ketertiban dan mempersembahkan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator. Pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menerangkan arti dari permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Penjelasan tentang permukiman kumuh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 13 yaitu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Karakter penduduk yang menetap pada permukiman kumuh merupakan bagian dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau ekonomi lemah terbelakang dengan pendidikan yang masih kurang sehingga mengakibatkan pengetahuan tentang permukiman sehat cenderung jauh dari harapan.

Permukiman kumuh adalah masalah yang benar-benar mendesak dan harus segera ditangani di Kabupaten Tangerang. Untuk mengatasi masalah perihal kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggunakan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi. GEBRAK PAKUMIS PLUS

adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadapi atau menanggulangi kemiskinan yang secara langsung dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kabupaten Tangerang. Saat ini program tersebut sudah diperbaharui dan ditambahkan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi agar lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakatnya dibangun serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan lebih baik dan Program Gebrak Pakumis Plus itu sendiri merupakan program unggulan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, di Kecamatan Rajeg, masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Rajeg memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya didalam pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Pemerintah disini lebih mengarah kepada yang memberikan fasilitas, mengakomodasi dan memberikan dana hibah kemudian mengedukasi masyarakatnya sedangkan masyarakat yang menjalankan program, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama antara kedua pihak agar hasil yang diinginkan dari program ini dapat tercapai khususnya di Kecamatan Rajeg yang dijadikan fokus penelitian oleh penulis. Kemudian dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kembali karena masih memiliki kendala dalam hal pelaksanaan dan juga pada saat dilapangnya. Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan, maka penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan program yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yaitu Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin Dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (GEBRAK PAKUMIS PLUS), dan penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
3. Dampak positif dari Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan maupun program Gebrak Pakumis itu sendiri.

Pertama; penelitian Agisthia Lestari dalam eprints.untirta.ac.id yang berjudul **IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN KRESEK TAHUN 2012)**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Gebrak Pakumis di

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 tidak berjalan maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai maksud dan tujuan, proses pemberdayaan yang tidak berjalan optimal, proses penetapan KPM yang tidak cermat, pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sulitnya mengelola dana bantuan dalam realisasi pembangunan rumah (Agisthia Lestari: 2012).

Kedua penelitian Yuni Angelia Tampubolon dalam repository.unpad.ac.id yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) DI DESA KEMUNING KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Gebrak Pakumis di Desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan maksimal yang disebabkan oleh berbagai aspek. Beberapa yang perlu diperhatikan agar proses implementasi berjalan dengan baik adalah dilakukannya sosialisasi program kepada masyarakat secara berkala, adanya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik dengan materi yang terarah dan berkelanjutan, serta dilakukannya pengawasan dan pemeliharaan terhadap prasarana dan sarana yang telah dibangun melalui program ini (Yuni Angelia Tampubolon : 2014).

Ketiga penelitian Eko Nurcahyo dalam eprints.untirta.ac.id yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Gebrak Pakumis di Kecamatan Tigaraksa Tahun 2016 berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala seperti minimnya anggaran yang disediakan, kurang maksimalnya kinerja pihak KPM, Keterbatasan jumlah SDM dan lamanya proses birokrasi (Eko Nurcahyo : 2016).

Keempat penelitian Nendi Rinaldi dalam eprints.untirta.ac.id yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) GULA AREN TENTANG KLASER INDUSTRI DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program IKM di Kabupaten Lebak berjalan dengan baik walaupun masih ada hal yang harus dibenahi (Nendi Rinaldi : 2017).

Kelima penelitian Siti Maezahroh dalam eprints.untirta.ac.id yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN) DI KABUPATEN TANGERANG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Gerbang Mapan belum berjalan dengan optimal secara pelaksanaan masih banyak desa dan kegiatan yang belum dilaksanakan, Program Gerbang Mapan belum memberikan dampak signifikan, belum terbangunnya koordinasi dilingkungan SKPD maupun pemerintahan desa dan belum adanya pengawasan (Siti Maezhahroh : 2018)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Program Gebrak Pakumis Plus dimana bukan hanya membangun rumah tidak layak huni tetapi membangun manusianya itu sendiri. Konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori dari Van Horn dan Van Meter (1975) yang mengatakan bahwa kinerja dapat dilihat dari enam indikator yaitu ukuran dan tujuan, Sumber Daya, Komunikasi antar organisasi terkait dan aktifitas pelaksana, karakteristik badan, Kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi.

1.5 Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Maksud

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan data dan fakta tentang Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak positif dari Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

Kegunaan

a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada umumnya, Kecamatan Rajeg pada khususnya, dalam mengimplementasikan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

b. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan konsep Implementasi Kebijakan.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Seluruh rangkaian penelitian dan penyusunan Laporan Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman, sebagai bekal untuk menjalankan tugas dimasa yang akan datang.

2.1 Tinjauan Teoretis

Implementasi Kebijakan

Friedrich dalam Widodo (2017:13) mengartikan kebijakan sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Sedangkan Jones dalam Tahir, (2014:25) menyatakan bahwa “kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Lester dan Steward dalam Winarno (2012:147) mengemukakan bahwa secara luas implementasi kebijakan itu memiliki makna pelaksanaan dari undang-undang dimana berbagai organisasi, prosedur, aktor dan teknik saling bekerja sama untuk menjalankan kebijakan demi meraih tujuan program.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syafitri & Setyoko (2008:19) “Kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan”. Ada beberapa variabel yang digunakan untuk mewujudkan standar dan sasaran tersebut diantaranya:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan aktifitas pelaksana
4. Karakteristik badan atau lembaga pelaksana
5. Kondisi ekonomi sosial dan politik
6. Disposisi

Proses di atas adalah proses dari penerapan suatu kebijakan yang pada hakikatnya dilaksanakan untuk mendapatkan kinerja dari implementasi kebijakan publik itu sendiri, yang berlangsung dengan hubungan dari beragam variabel. Model ini menggambarkan implementasi kebijakan yang bergerak secara garis lurus dengan keputusan politik yang ada, pelaksana serta kinerja kebijakan publik.

Program Gebrak Pakumis Plus

Schiller dalam Suyanto (2014:1) mengungkapkan bahwa “kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial”.

Laju urbanisasi sangat berhubungan dengan munculnya kawasan padat, kumuh dan miskin, seperti yang diungkapkan oleh Schoorl (1981:285) menyatakan bahwa urbanisasi itu berjalan dengan cepat, sehingga menimbulkan kekurangan fasilitas, ketidakmampuan pemerintah itu harus ditambah dengan ketidakmampuan penduduk untuk mengadakan fasilitas pokok, akibatnya lahirlah perkampungan *slum*.

Kuswartojo (2005:21) mendefinisikan permukiman merupakan perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Yang artinya permukiman memiliki arti bukan hanya sekedar perumahan dengan wadah fisik saja, akan tetapi perpaduan diantara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) serta isinya (termasuk yang bermasyarakat beserta budaya didalamnya).

Menurut Rudiyanoro (2000:8) ada dua standar yang dapat menentukan permukiman *slum* antara lain sangat kumuh dan kumuh hanya berdasar kepada kriteria fisik yaitu dari kondisi rumah dan ketersediaan sarana prasarana lingkungan seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, ketersediaan tempat ibadah, pendidikan, serta kesehatan.

Gebrak Pakumis Plus ini dibuat untuk menanggulangi permasalahan umum yang timbul pada kawasan permukiman kumuh seperti rumah yang tidak layak untuk ditinggali, sarana prasarana serta utilitas yang belum memadai bahkan buruk yang tersebar pada desa-desa serta kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Setiap tahunnya program atau kegiatan ini berusaha untuk meningkatkan terhadap penyediaan Prasarana, Sarana serta Utilitas (PSU) untuk 1000 rumah yang tidak layak huni atau tidak layak untuk ditinggali bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2.2 Tinjauan Legalistik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus.

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan bentuk metode yang memiliki hubungan antara masalah dengan data dilapangan dimana gambaran umum perihal masalah yang diteliti dijadikan analisis terhadap fakta-fakta yang benar adanya ataupun pengamatan mengenai masalah-masalah yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga mampu memberikan hasil berupa pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai pemecah masalah di masyarakat secara *universal*.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya langsung kepada seorang informan atau autoritas atau ahli yang memiliki wewenang dalam suatu masalah yang sedang peneliti teliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pencarian data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian baik berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, foto, audio, videotape dan sebagainya.

3. Observasi

Observasi merupakan langkah dalam mengumpulkan data melalui pengamatan langsung secara cermat di lapangan ataupun pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap giat keseharian serta budaya masyarakat yang ada pada Kecamatan Rajeg.

Teknik Analisis Data

Penulis pada saat menganalisis data menggunakan analisis data yang dikemukakan dalam Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012:247-252) memiliki tiga kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemudatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan, proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung, dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang (Gebrak Pakumis Plus) dilihat dari beberapa indikator

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran dan tujuan dari Program Gebrak Pakumis Plus itu sendiri sudah berjalan dengan baik, pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya pun berpartisipasi dengan aktif yang mengakibatkan pelaksanaan pada Program Gebrak Pakumis Plus dapat terbantu dengan cukup baik.

b. Sumber Daya

Beralaskan hasil wawancara di atas ketersediaan tukang bangunan atau sumber daya manusia masih kurang dengan alasan upah yang kurang sehingga pada pelaksanaannya menjadi kurang ideal bahkan terhambat, tapi permasalahan tersebut dapat teratasi dengan peran aktif daripada masyarakat yang tinggal disekitar penerima program dengan membantu proses pembangunan unit rumah dari awal hingga selesai dan dapat berjalan sesuai rencana dan waktu yang telah ditetapkan.

Sumber daya terkait anggaran Program Gebrak Pakumis Plus masih belum maksimal karena biaya ataupun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah tidak disesuaikan dengan harga bahan maupun biaya tukang saat ini, maka dari itu perihal anggaran pemerintah terhadap Program Gebrak Pakumis Plus harus disesuaikan kembali.

Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Rajeg untuk sumber daya waktu telah sesuai walaupun sangat sempit waktunya yaitu 3 bulan dan selama tahun 2020 sudah berhasil membangun 50 rumah itu pun berkat bantuan masyarakat yang mau bergotong-royong untuk menyelesaikan pembangunan di tiap rumah yang di bangun menjadi lebih baik.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dapat ditarik kesimpulan daripada hasil wawancara ini ialah untuk proses komunikasi pada bagian-bagian yang terkait dengan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus ini

sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari target Program Gebrak Pakumis Plus yang sudah berjalan sesuai rencana.

Proses sosialisasi daripada Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Rajeg berjalan dengan baik, dilakukan dengan cara bertahap dan juga sebelum pelaksanaan sosialisasi dilakukan verifikasi, pemetaan serta pendataan ulang agar tepat sasaran. Untuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan serta UPK tidak hanya formal saja, non formal pun terlibat contohnya melalui media sosial.

d. Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya untuk mendapatkan para pelaksana yang saat ini mengemban tugas untuk menjalankan program Gebrak Pakumis Plus, mereka telah melewati proses tertentu dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitas individunya sehingga didapatkan para pelaksana yang baik, tujuan dari proses seleksi itu ialah agar para pelaksana mampu untuk mengelola program Gebrak Pakumis Plus dengan baik. Untuk Program Gebrak Pakumis Plus itu sendiri memiliki struktur organisasi yang baik agar koordinasi pada tiap pelaksana dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Untuk tim UPK hingga saat ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik hal itu dibuktikan dari capaian target yang selalu terpenuhi dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dikemudian hari ditemukan terdapat penyimpangan pada unsur-unsur yang melaksanakan Program Gebrak Pakumis Plus maka akan langsung mendapatkan sanksi berupa pemberhentian dan kemudian dilanjutkan oleh pihak yang berwenang.

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hasil dari wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Program Gebrak Pakumis Plus ini banyak membantu warga yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kualitas dari huniannya itu sendiri, kemudian masyarakat sangat mengharapkan agar Program Gebrak Pakumis Plus ini dapat ditambah kuotanya agar banyak yang tersentuh oleh Program Gebrak Pakumis Plus itu sendiri dan tidak ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Pada pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus ini masyarakat turut berpartisipasi aktif dikarenakan manfaat dari program ini sangat luar biasa yaitu bukan hanya membangun hunian melainkan meningkatkan kualitas hunian mereka.

Unsur pimpinan di Kabupaten Tangerang yaitu Bupati maupun wakilnya mendukung penuh Program Gebrak Pakumis Plus ini dan dapat dibuktikan juga dengan dibuatnya Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kabupaten Tangerang.

f. Disposisi

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara bahwa instansi yang berwenang dalam menangani Program Gebrak Pakumis Plus dan unsur yang terkait dalam Program Gebrak Pakumis Plus ialah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman serta para unsur yang

tergabung dalam program Gebrak Pakumis Plus harus memahami setiap tahapan dan fungsinya masing-masing sesuai dengan juknis yaitu Peraturan Bupati No.63 Tahun 2019. Kecamatan Rajeg sangat antusias dan tentunya mendukung pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus itu sendiri mengingat program ini merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Tangerang dan merupakan program pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang berpenghasila rendah agar memiliki rumah layak huni dan memiliki sanitasi yang baik untuk kesehatan mereka pribadi. Serta adanya harapan dari implementor kepada program ini agar untuk kedepannya dapat lebih baik lagi serta semakin banyak masyarakat yang terdampak dari Program Gebrak Pakumis Plus itu sendiri sehingga semakin berkurangnya kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Rajeg.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Rajeg

a. Pendukung

1. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang mendukung penuh jalannya Program Gebrak Pakumis Plus.
2. Sikap pelaksana yang sangat antusias serta mendukung penuh pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana yang berjalan dengan baik

b. Penghambat

1. Sumberdaya anggaran pada Program Gebrak Pakumis Plus yang belum disesuaikan dengan keadaan dilapangan
2. Aparatur yang tingkat pendidikannya rendah
3. Program yang terbatas oleh Kawasan

4.3 Dampak Positif Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

1. Masyarakat hidup ditempat yang lebih layak
2. Masyarakat sekarang memiliki WC pribadi, dengan harapan kesehatan mereka semakin membaik.
3. Terciptanya sikap solidaritas gotong royong yang tinggi antar warga.
4. Anak-anak yang mentalnya sudah terbangun dan tidak malu lagi dengan kondisi rumahnya yang terdahulu dengan harapan anak-anak tersebut akan lebih semangat lagi dalam kegiatan belajar di tempat tinggalnya.

4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

kegiatan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus yang dilaksanakan oleh Tim UPK kecamatan Rajeg pada program pembangunan rumah dengan berbasis kawasan di Kecamatan Rajeg berjalan dengan lancar hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana program Gebrak Pakumis Plus yang telah membangun 50 rumah tidak layak huni di Kecamatan Rajeg pada Tahun 2020. Temuan penting dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Gebrak

Pakumis Plus yaitu kebijakan yang terpaku dengan berbasis kawasan, sumber daya anggaran yang tidak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan dan pendidikan terakhir para pelaksananya yang terbatas hanya sampai SMA.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, analisis dan pembahasan sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya terhadap implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, penulis dapat kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang telah berjalan dengan baik dan sesuai target dimana peningkatan terhadap hunian tidak layak huni sebanyak 50 unit rumah di Kecamatan Rajeg pada tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Faktor yang mendukung Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, yaitu masyarakat yang mendukung program Gebrak Pakumis Plus dengan turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya sehingga dapat menyukseskan program unggulan Kabupaten Tangerang yaitu Program Gebrak Pakumis Plus
 - b. Sikap dan aktifitas pelaksana, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh tim teknis dan tim pelaksana sebagai para implementor yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus sehingga program unggulan ini dapat terlaksana dengan baik
 - c. Komunikasi antar organisasi yaitu harmonisasi atau kerjasama antara Tim Teknis dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara rutin pada pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus.

Faktor yang menghambat dalam implementasi Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Rajeg diantaranya :

- a. Kebijakan dalam Program Gebrak Pakumis Plus yang memiliki Batasan berbasis Kawasan, hal ini yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan karena harus memiliki kriteria dimana masyarakat penerima manfaat harus berada di dalam 1 kawasan kumuh yang terdiri dari minimal 15 hunian tidak layak huni dalam 1 kawasan, jika kurang dari 15 hunian maka program Gebrak Pakumis Plus tidak dapat dilaksanakan.
- b. Sumber daya, yang dimaksud adalah sumber daya anggaran dimana setiap rumah yang mendapatkan Program Gebrak Pakumis Plus diberikan Rp. 25.000.000 yang mana itu harus cukup untuk membangun rumah dengan

ukuran 6x6 dalam waktu 2 minggu sehingga sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam setiap proses pembangunannya.

- c. Karakter badan atau instansi pelaksanaanya, maksudnya adalah dari tim pelaksana lapangan yang memiliki tanggung jawab di lapangan hanya terdiri dari 2 orang yang memiliki latar belakang Pendidikan hanya sampai SMA.

Dampak positif Program Gebrak Pakumis Plus diantaranya :

- a. Masyarakat hidup ditempat yang lebih layak.
- b. Masyarakat sekarang memiliki WC pribadi, dengan harapan kesehatan mereka semakin membaik.
- c. Terciptanya sikap solidaritas gotong royong yang tinggi antar warga.
- d. Anak-anak yang mentalnya sudah terbangun dan tidak malu lagi dengan kondisi rumahnya yang terdahulu dengan harapan anak-anak tersebut akan lebih semangat lagi dalam kegiatan belajar di tempat tinggalnya.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Rajeg beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang turut membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adriasih, Hetty. 2004. *Kebijakan Publik Dalam Menanggulangi Peningkatan Penderitaan Akibat Pencemaran Air di Wilayah DKI Jakarta*. Jakarta: Publikasi FE UI.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Hafsah, M. Jafar. 2008. *Pengentasan kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Iris Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Hamdi, Muchlis, dan Ismaryati Siti. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Kedua. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kuswartojo, Tjuk, dkk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: ITB.
- Syafitri, Wirman dan Setyoko, Israwan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan etika Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor

- Neuman. 2006. *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. United State Of America. Person.
- Nugroho, Riant. 2012(2014). *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Romdiati, Haning dkk. 2004. *Migrasi dan Permukiman Kumuh di Surabaya*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Sadyohutomo, Muyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realitas dan Tantangan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik teori, proses, dan Study Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2014. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganan*. Malang: Intrans Publishing.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahh*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2013. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Schoorl, J.W. 1981. *Modernisasi*. Jakarta: Gramedia

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus.

3. SUMBER LAIN

<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/18767>

<http://eprints.untirta.ac.id/1286/>

<http://eprints.untirta.ac.id/988/>

<http://eprints.untirta.ac.id/1038/>

<http://eprints.untirta.ac.id/1068/>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang.

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang Dalam Angka.

<https://Siga.tangerangkab.go.id/>

<https://petatematikindo.wordpress.com/>